



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 27 /KEP/172.2-DPRD/XI/2025

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATTAEN BEKASI TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perencanaan Penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda;
- b. bahwa program pembentukan Perda disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, DPRD Kabupaten Bekasi perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Bekasi Nomor : 100.3.2/ 9867/HUK /2025 tanggal 25 November 2025 Perihal Usulan Propemperda Tahun 2026;
2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025;
3. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi membahas Usulan Propemperda Tahun 2026;
3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 26 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2026

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan pedoman dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2026.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2026 dapat diajukan oleh DPRD atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 26 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,



ADE SUKRON

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi
Nomor : 27/KEP/172.2-DPRD/XI/2025
Tanggal : 26 November 2025
Tentang : Propemperda Kabupaten Bekasi Tahun 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	Jenis Urusan	PROGRAM PRIORITAS	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET	KET
						BARU	UBAH		NA	NOTA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Rancangan Peraturan Daerah	Desa	Penyesuaian maeri muatan terkait Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa dan Administrasi Pemeritahan Desa	Wajib Non Pelayanan Dasar	Daerah	Baru		Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan terkait Desa	NA		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	TW.I	Baru
2.	Rancangan Peraturan Daerah	Ketertiban Umum	Pengaturan terkait Ketertiban Umum	Wajib Pelayanan Dasar	Daerah	Baru		Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan terkait Ketertiban Umum	NA		Satpol PP	TW.I	Baru
3.	Rancangan Peraturan Daerah	Pemanfaatan Bagian Jalan	Pengaturan terkait kewenangan Penyelenggara, definisi, Izin dan Prosedur pemanfaatan, perizinan berbasis resiko, pengawasan dan sanksi, dan tata pemindahan dan pembongkaran	Pilihan	Daerah	Baru		Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan terkait Pemanfaatan Bagian Jalan	NA		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Kontrukasi	TW.I	Baru
4.	Rancangan Peraturan Daerah	Perlindungan Guru	Pengaturan terkait Perlindungan Guru	Wajib Pelayanan Dasar	Daerah	Baru		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Guru	NA		Komisi IV	TW.I	Baru

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	Jenis Urusan	PROGRAM PRIORITAS	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET	KET
						BARU	UBAH		NA	NOTA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Rancangan Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Kepariwisata	Pengaturan terkait Penyelenggaraan Kepariwisata	Pilihan	Daerah	Baru		Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Kepariwisata	NA		Dinas Pariwisata	TW.II	Baru
6.	Rancangan Peraturan Daerah	Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Pertanian	Pengaturan terkait Penyelenggaraan Pembangunan Pertanian	Pilihan	Daerah	Baru		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Pembangunan Pertanian	NA		Komisi II	TW.II	Baru
7.	Rancangan Peraturan Daerah	Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2025	Pengaturan dan hasil penyerapan atas pelaksanaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban			Baru		Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah	NA		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	TW.III	Rutin
8.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Pengaturan terkait Kawasan Tanpa Rokok	Wajib Pelayanan Dasar	Daerah		Ubah	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait Kawasan Tanpa Rokok	NA		Dinas Kesehatan	TW.III	Baru
9.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan APBD Kabupaten Bekasi T.A 2026	Pengaturan dan pengelolaan mekanisme atas adanya perubahan dan atau penambahan pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan dalam waktu berjalan			Baru		Disesuai dengan jenis dan kebutuhan real pokok yang mengalami perubahan dan atau penambahan atau suatu pelaksanaan kegiatan		Penjelasan atau keterangan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	TW.III	Rutin
10.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi	Penyesuaian materi muatan dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi	Wajib Pelayanan Dasar	Daerah		Ubah	Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi	NA		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	TW.IV	Usulan Prope m perda Tahun 2025

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	Jenis Urusan	PROGRAM PRIORITAS	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET	KET
						BARU	UBAH		NA	NOTA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	Rancangan Peraturan Daerah	APBD Kabupaten Bekasi T.A 2027	Pengaturan dan Penyelenggaraan dalam hal penganggaran daerah			Baru		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD		Penjelasan atau keterangan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	TW. IV	Rutin
12.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan, Rumah Susun dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi	Tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah peraturan dan pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan	Wajib Pelayanan Dasar	Daerah		Ubah	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	NA		Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	TW.IV	Baru

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,


DE SUKRON